

**ANALISIS RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI



Oleh :

MOH. YASIN
NIM. 083 134 028

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2018**

**ANALISIS RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

MOH. YASIN
NIM. 083 134 028

Dosen Pembimbing :

Dr. Abdul Rokhim, M. E. I
NIP. 19739830 199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2018**

**ANALISIS RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014-2016**

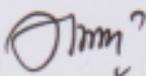
SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

MOH. YASIN
NIM. 083 134 028

Disetujui Pembimbing :



Dr. Abdul Rokhim, M. E. I
NIP. 19739830 199903 1 002

ANALISIS RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2014-2016

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Daru Anondo, SE, M, Si

NIP:19750703 200901 1 009



Nikmah Masruroh, M. E. I

NIP:19820922 200901 2 005

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP:19740725 200212 1 003

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil.

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa bersyukur yang tiada batas kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kedua orang tua bapak ibu saya (Bapak Marhawi dan Ibu Sabiye), beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Tak henti-hentinya selalu mencurahkan perhatian, do'a yang tulus, motivasi, kasih sayang yang besar bagi saya.
2. Keluarga besarku yang selalu mensupport dan memotivasi dalam menuju kesuksesan.
3. Kakak laki-laki Sahramo terimakasih yang selalu memberikan semangat bagi saya dan menanamkan optimisme.
4. Semua guru-guru dan ustadz ustadzah yang telah memberika ilmu-ilmunya dan semoga selalu barokah dan bermanfaat.
5. Kepada lembaga Pondok Pesantren Al-Qodiri yang telah memberikan wadah dalam proses belajar mengajar
6. Pembimbing saya, Dr. Abdul Rokhim, M. E. I
7. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nikmatul Masruroh, M.E.I
8. Almamater saya IAIN Jember, dan para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Kepada sahabat-sabat seperjuangan Banyuwangi Khususnya kepada anak banyuwangi K-1 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.

10. Saudara-saudara tercinta dan seperjuangan Comunitas “IKASABA”
Ikatan Santri Banyuwangi yang telah memberikan suport dan mengajari
hidup dengan berkarya, bersosial dan bersaudara.

11. Terimakasih kepada teman-teman Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember
yang selalu memberi saya semangat dalam mengerjakan tugas akhir
Skripsi.

12. Teman-teman seperjuangan K-1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam.

Adik-adik Osis MA. Al-Qodiri yang tiada henti-hentinya memberi semangat
dan mensuport dalam mengerjakan tugas akhir.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puja dan puji syukur yang tiada batas atas kehadiran sang Ilahi Robbi Allah SWT yang telah memberikan rahat dan nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung yakni Nabi Muhammad SWT yang telah membawaa ummatnya kejalan yang lurus.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karen aitu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M..S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap dosen IAIN Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah.
7. Ibu Mala selaku Staf Umum PAD Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian untuk penyelesaian tugas akhir (Skripsi).

8. Ibu Indah selaku Staf Kasubit Pembukuan PAD Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember
9. Ibu Novi selaku Staf Sekretariat DISPERINDAG Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian untuk penyelesaian tugas akhir.
10. Bapak Septantono sebagai tangan kanan Ketua DISPERINDAG Kabupaten Jember.
11. Seluruh Staf-staf DISPERINDAG yang telah membantu lancarnya penelitian.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat nantinya bagi penulis dan bagi pembaca, penulis berharap demi suatu kesempurnaan skripsi ini ada suatu kritik dan saran yang sifatnya membangun, meski sesungguhnya tiada kesempurnaan karena kesempurnaan itu sesungguhnya itu adalah pemilik sang pencipta yakni Allah SWT.

IAIN JEMBER

Jember, 27 September 2017

MOH. YASIN
NIM. 083 134 028

ABSTRACT

Moh. Yasin, 2017: *Traditional Market Levy Analysis in Jember District 2014-2016.*

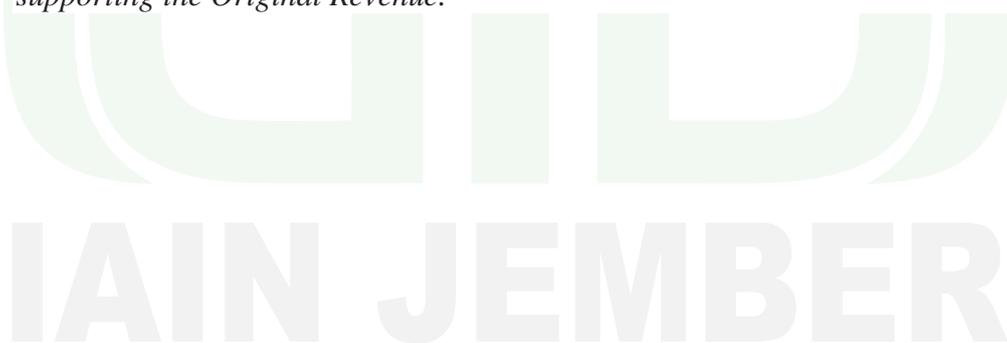
The market is a business unit that has a strategic role on the way the distribution network from producers to consumers who need a product. Thus the market can be said to be the direct provision of the daily needs of the community, and various interactions in it involving elements of government, private, and society (traders and buyers).

Research Focus under study: 1) How is the effectiveness of market levies in Jember Regency? 2) What is the contribution of market retribution to Local Revenue in Jember Regency?

The purpose of this research: 1) To know the effectiveness in Jember District Jember. 2) To know the contribution of Retribution Market to the original revenue of area in Jember Regency.

In this research, this research uses qualitative approach that is qualitative-descriptive that is a research that describes and describes a problem. Researchers attempt to explain and describe Traditional Market Levy Analysis in Jember District Year 2014-2016.

The conclusions of this research are: 1) The average effectiveness of market levy collection in Jember regency is 98.58 percent, it indicates that the average collection of market levy is less effective because in two budget years, not exceeding 100 percent and only in 2016 beyond 100 percent and this is caused because the target from the previous is less. 2) The contribution of retribution of market retribution revenue to the original income of Jember Regency during the budget year 2014-2016 is an average of 70.68 percent while the contribution to regional levy is 33.86 percent. The role or contribution is still less effective so less supporting the Original Revenue.



ABSTRAK

Moh. Yasin, 2017: *Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016.*

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli).

Fokus Penelitian yang diteliti: 1) Bagaimana efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Jember? 2) Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember?

Tujuan dalam penelitian ini: 1) Untuk mengetahui efektifitas di Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui kontribusi retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten Jember adalah sebesar 98,58 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif karena dalam dua tahun anggaran, angkanya hamper tidak melampaui angka 100 persen dan hanya pada tahun 2016 melampaui 100 persen dan ini pun di sebabkan karena targe dari sebelumnya di kurangi. 2) Kontribusi retribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember selama Tahun anggaran 2014-2016 adalah rata-rata sebesar 70,68 persen sedangkan kontribusi terhadap retribusi daerah adalah sebesar 33,86 persen. Peranan atau kontribusi tersebut masih kurang efektif sehingga kurang menunjang Pendapatan Asli Daerah.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	26
1. Retribusi Pasar	26
2. Pasar Tradisional.....	27

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	91
C. Pembahasan Temuan.....	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan politik nasional yang sejalan dengan penggantian penguasa telah memicu perubahan-perubahan penting disuatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.¹ Perubahan yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam Undang-Undang No 32 Th 2004. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud. Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan saran maupun prasarananya. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan UU No 32 Th 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintahan kabupaten merupakan

¹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Reublik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).135

peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki kompetensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan demikian kehidupan masyarakat yang harus dilayani.² Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa di upayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan dan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

² *Ibid.*, 136

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.³

Dalam pelaksanaan otonomi daerah hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Kabupaten, dalam hal ini diterangkan dalam UU No 34 Th 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini retribusi juga diatur oleh peraturan daerah masing-masing kabupaten.

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Jember adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Jember. Dipenda merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian pelaksanaan fungsi otonomi oleh pemerintah daerah khususnya oleh pemerintah Kota Jember adalah cukup berat, karena harus dibarengi pencarian dana untuk menuju ke otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyediaan

³ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali, 2014). 431

langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli).⁴ Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retrebusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan bagi pemda Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan peningkatan pendapatan tersebut pemerintahan juga harus mengimbangi pembenahan-pembenahan di pasar Kabupaten Jember, seperti administrasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pasar. Dengan demikian Pemkab Jember bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat.

Harapan ukuran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2014-2016 adalah tinggi, hal ini ditetapkan agar dapat menjadi modal utama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.⁵ Sebagaimana Santoso (1995: 20) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah seluruhnya tidak dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indeks derajat

⁴Thamrin Abdullah. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali, 2016).

⁵ Mala, *Wawancara, Jember 07 Agustus 2017*

kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dari rekapitulasi realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2014-2016 ukuran penerimaan yang tinggi adalah dari Dana Perimbangan dan ukuran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember masih rendah. Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai sehingga Pendapatan Asli Daerah belum bisa menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.

Dengan demikian penelitian diharapkan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan peningkatan pendapatan tersebut pemerintah harus mengimbangi pembenahan-pembenahan di pasar Kabupaten Jember, seperti administrasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pasar. Dengan demikian Pemkot Jember bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat.

Penulis mengambil Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian

adalah ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember. Di samping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Dipenda Kabupaten Jember sudah maksimal dalam memungut Retribusi Pasar. Berawal dari latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul: Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016.

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah disebut dengan fokus dalam penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, oprasional yang dituangkan dalam bentuk kalimatnya.⁶

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Jember?
2. Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti.⁷ Untuk mendapatkan

⁶ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015),45.

⁷Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008),51-52.

keberhasilan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas di Kabupaten Jember Jember.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.⁸ Dan manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.⁹

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah.¹⁰

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman yang lebih mendalam bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 283.

⁹ *Ibid.*, 73

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: IAIN Jember Pres, 2015), 45.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bagi pihak IAIN Jember dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang analisis retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana retribusi pasar dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Jember Tahun 2014-2016.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian.¹¹ Hal yang seperti ini tertentu sangat perlu untuk dijelaskan dan diuraikan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kerancuan dalam memahami makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun yang menjadi definisi dari judul "*Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016*" adalah sebagai berikut:

¹¹ Babun Suharto. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45.

1. Retribusi Pasar

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.¹²

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.¹³

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeliditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan pembeli secara langsung.¹⁴ Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).¹⁵

¹² Setu Setiawan, *perpajakan indonesia*, (Malang: UMM Press.2009), 293.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers.2014), 6.

¹⁴ Nahdliyulizza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010), 2.

¹⁵ Deddy Supriyady Bratukusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum. 2004). 83

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa poin sebagaipenjabaran. Adapun bentuk suatu sistem yang digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini sebagai berikut:

BAB I penulis membahas tentang pokok-pokok pikiran untuk memberikan gambaran terhadap inti pembahasan. Pada bab ini terdiri dari: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang analisis retribusi pasar, pajak, pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III membahas tentang metode peneliti meliputi :pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap data.

BAB IV membahas tentang laporan hasil penelitian, penulis menyajikan data dan menganalisa data tersebut untuk membuktikan rumusan masalah dan menunjukkan bahwa tujuannya sudah dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan.

BAB V penutup, membahas tentang kesimpulan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, dan kemudian mengemukakan beberapa saran kepada lembaga yang bersangkutan yang mungkin dapat diterapkan dalam mencapai hasil yang lebih efisiensi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Peneliti Terdahulu

Masalah yang terkait dengan retribusi pasar sebenarnya sudah banyak dibahas dan diteliti, akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang retribusi pasar. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema ini, antara lain:

1. Rahmasari dengan judul “*Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siderang Rappang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem *official assesment*, yaitu pemungutan langsung

menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%. Kata kunci: Retribusi pasar, pertumbuhan, potensi, pendapatan asli daerah.

2. Jannatin Alfafa dengan judul "*Analisis Retribusi Pasar dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 2005-2007*". Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar, untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang disajikan populasi adalah realisasi retribusi pasar dan pendapatan asli daerah tahun 2005-2007. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel karena jumlah populasi yang diambil kurang dari 100, maka seluruh populasi yang ada dijadikan subjek penelitian. Penelitian ini juga tidak menggunakan sampling karena semua populasi yang ada dijadikan subjek penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar selama tahun 2005-2007

seluruhnya sudah efektif hal ini terbukti pada tahun 2005 prosentasenya lebih dari 100 % yaitu mencapai 106,65 %, sedangkan tahun 2006 mencapai 101,24 %, dan tahun 2007 mencapai 104,93 %. Dari segi efisiensi pemungutan retribusi pasar dari tahun 2005-2007 sudah efisien, terbukti dari perhitungan rasio efisiensi menunjukkan hasil kurang dari 100 %, yakni pada tahun 2005 sebesar 93,78 %, tahun 2006 sebesar 98,77 % dan tahun 2007 sebesar 95,29 %. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2005-2007 mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan kontribusi terendah sebesar 11,64 %. Kontribusi tertinggi sebesar 14,17 % dan rata-rata kontribusi sebesar 11,73 %.

3. Suprapta Adi dengan judul *“Kontribusi Retribusi Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan”*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil judul *“Kontribusi Retribusi Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan”*, yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini yaitu salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tabanan yaitu melalui retribusi, yang salah satunya adalah pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain: bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di kabupaten tabanan serta bagaimana hubungan antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan. Penelitian ini menggunakan metode empiris

dan memperoleh kesimpulan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik dan berbading lurus dengan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan.

4. Noviaty Putri Wardhani dengan judul *“Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. (2) Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. (3) Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap 3 variabel yaitu variabel independen (bebas) adalah Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta variabel dependen (terikat) adalah Pendapatan Asli Daerah. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen/arsip yang ada dikantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Model analisis yang digunakan adalah menggunakan metode statistik

dalam bentuk regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Uji t), sekaligus untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat (Uji F). Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis didapatkan secara simultan besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh pendapatan yang lain. Sedangkan secara parsial, besarnya pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan oleh pendapatan lain dan juga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64,4% sedangkan 35,6% dijelaskan oleh pendapatan yang lain. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan maka digunakan uji F. Karena F_{hitung} (20,724) lebih besar dari F_{tabel} (4,74). Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pasar (X_1) dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (X_2) terbukti secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maka digunakan uji t. Untuk variabel Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (X_2) karena t_{hitung} (3,805) lebih besar dari t_{tabel} (1,8125). Hal ini

menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (X2) terbukti secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Untuk variabel Retribusi Pasar (X1) karena thitung (6,192) lebih besar dari ttabel (1,8125) pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pasar (X1) terbukti secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

5. Nur' Ainy dengan judul "*Administrasi Retribusi Pasar di Kota Bekasi*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh JamesMcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

6. Rizki Samarotin dengan judul *“Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Seagama Purbalingga)”*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang penulis lakukan subjek penelitian adalah Kepala UPTD Pasar Segamas, pedagang, pengunjung, serta staf karyawan. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik perspektif ekonomi Islam pada Pasar Segamas Purbalingga. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data yaitu menggunakan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan.

7. Nirwana dengan judul *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”*. Penelitian

ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kota Bandung masih mengalami banyak hambatan baik itu dari sumber daya yang kurang berkompeten, komunikasi yang masih sulit terjalin, disposisi pegawai seperti kurangnya komitmen yang dimiliki oleh karyawan dari pihak PD Pasar bermartabat. Hal-hal tersebut yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kota Bandung belum terimplementatif dengan baik. Kesimpulan penelitian ini bahwa Implementasi sudah berjalan cukup baik walaupun masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar target yang diinginkan bisa tercapai dengan maksimal. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan pihak PD Pasar Bermartabat lebih tegas dalam melaksanakan Kebijakan Retribusi Pasar serta bisa memperbaiki fasilitas yang ada di pasar sehingga pedagang tidak merasa keberatan untuk membayar retribusi pasar. Selain itu bisa menarik minat konsumen lebih banyak untuk berbelanja ke pasar tradisional.

8. Rio Hamunangan Sihombing dengan judul "*Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi dalam Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematang Siantar)*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kota

Pematangsiantar dalam hal penentuan target sudah maksimal dimana penentuan target yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasar dan berdasarkan semua jenis potensi yang ada di pasar, namun dalam hal pelaksanaan SDM aparat atau petugas yang melaksanakan pemungutan belum maksimal dan adanya aset berupa lahan pasar yang belum dikelola oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar karena dengan melihat kenyataan yang ada target dan realisasi retribusi pasar tidak pernah mencapai target. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut : 1.) Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada, 2.) Meningkatkan perawatan fisik bangunan, kebersihan, pelayanan dan sumber daya manusia, 3.) Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan / diklat, 4.) Melakukan upaya penyehatan keuangan perusahaan, 5.) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah, 6.) Menetapkan standarisasi harga eceran tertinggi dan terendah dan pelayanan pasar bersama lembaga terkait, 7.) Mencari bantuan dana dari APBD Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar untuk investasi pembangunan pasar, 8.) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.

9. Ach. Misbahul Munir dengan judul” *Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Jember, 2) upaya-upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember, 3) kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan potensi pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan strategi tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan terdiri dari informan, tempat penelitian serta dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Jember terdiri dari potensi alam, non alam dan potensi minat khusus serta potensi atraksi seni dan budaya. Potensi alam yang ada di Jember antara lain berupa flora, fauna dan iklim yang sejuk. Potensi non alam terdiri dari taman rekreasi dan benda-

benda peninggalan nenek moyang seperti candi-candi Hindu yang ada di kawasan obyek wisata Dataran Tinggi Dieng serta potensi minat khusus Arung Jeram yang memanfaatkan sungai Serayu. Kondisi dari potensi tersebut ada yang sudah dikembangkan dan ada yang masih dalam tahap perencanaan dan tahap pengembangan. 2) Berdasarkan pada potensi yang ada, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melakukan upaya pengembangan. Upaya pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang positif yaitu, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan obyek wisata. Kenaikan jumlah pendapatan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Persentase retribusi daerah dari sektor pariwisata tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah 6,39%, 3,46%, 3,95%, 3,68% dan 3,23% sehingga retribusi daerah dari sektor pariwisata “berperan” terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. 3) Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengalami kendala atau hambatan dalam usaha pengembangannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: (a) faktor masyarakat, (b) kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola pariwisata, (c) anggaran dana yang terbatas, (d) kurangnya kerjasama dengan pihak swasta untuk investasi dalam bidang pariwisata, (e) persaingan obyek dan daya tarik wisata antar

kabupaten. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melakukan upaya-upaya antara lain :

(a) Mengadakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola obyek wisata agar kinerja semakin meningkat serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, c) meningkatkan koordinasi antar dinas di lingkungan Kabupaten Banjarnegara serta dinas di luar Kabupaten Jember untuk mengadakan promosi pariwisata. Kegiatan promosi ini juga bertujuan untuk menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di bidang pariwisata, (d) peningkatan sarana dan prasarana pariwisata seperti aksesibilitas dan akomodasi, (e) mengoptimalkan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai obyek wisata agar mampu bersaing dengan obyek wisata yang ada di kabupaten lain.

10. Moh. Furqon Aftoni dengan judul'' *Studi Kasus Dampak Dira Shopping Centre Terhadap perdagangan Pasar Tradisional Balung Kabupaten Jember*'' . Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Jember merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas Pasar dengan menggunakan sistem *official assesment*, yaitu pemungutan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 dengan sistem pemungutan secara langsung menggunakan benda berharga atau karcis. Pelaksanaan pada tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dan selalu bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan rata-rata sebesar 2,15%. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Magetan antara lain kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, dan petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu:

No	Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan
1.	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Rahmasari A31112015	Kualitatif	Mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sedenreng Rappang.	Sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah
2.	Analisis Retribusi Pasar dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2005-2007 Jannatin Alfafa	Kuantitatif	Objek Penelitian	Sama-sama ingin mengetahui pemungutan retribusi pasar di kota Surakarta telah efektif

	A 210 050 100			
3.	Kontribusi Retribusi Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Suprapta Adi	kualitatif	Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di kabupaten Tabanan	Sama-sama meneliti pendapatan asli daerah
4.	Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Sidoarjo Noviati Putri Wardhani Npm064101 0009	Kuantitatif	Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Kabupaten Sidoarjo	Sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah
5.	Adminitrasi Retribusi Pasar di Kota Bekasi Nur'ainy 0706283885	Kualitatif	Melakukan adminitrasi retribusi pasar	Sama meneliti pemungutan retribusi pasar
6.	Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Public Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Pasar Segama Purbalingga) Rizki Samarotin NIM. 1123203057	Kualitatif	Lebih menerangkan atau fokus pada tarif yang pada dalam pasar	Pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar segemas

7.	Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Nirwana E 121 08 535	Kualitatif	Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kota Bandung masih mengalami banyak hambatan	Sama-sama meneliti retribusi pasar
8.	Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar) Rio Hamonangan Sihombing 120903085	Kualitatif	Perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan daerah pasar horas jaya kota Pematangsiantar.	Retribusi pasar, Pendapatan Asli Daerah
9.	Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Ach. Misbahul Munir	Kualitatif	Strategi Pengembangan Pariwisata	untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
10	Studi Kasus Dampak Dira Shopping Centre Terhadap Pedagangan Pasar Tradisional Balung Kabupaten Jember M. Furqon Aftoni 083134027	Kuantitatif	Dampak Dira Shopping Centre Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Balung Kabupaten Jember	Sama-sama membahas pasar Tradisional

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai pers-pektif dalam melakukan penelitian¹⁷

1. Retribusi Pasar

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.¹⁸

Adapun macam-macam retribusi pasar di Kabupaten Jember yaitu:

1) Retribusi Pembangunan pasar

1) *Retribusi Kios*. Kios adalah bangunan tempat dasaran dilingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruang yang jelas misalnya tembok, papan dan sebagainya.

2) *Retribusi Los*. Los adalah bangunan berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran.

3) *Retribusi Dasaran Terbuka*. Dasaran Terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang yang tidak tetap.

¹⁷IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

¹⁸ *Ibid*, 6.

- 2) *Biaya adminitrasi ijin penggunaan pembangunan pasar.* Biaya adminitrasi ijin penggunaan pembangunan pasar adalah dikenakan bagi badan atau perorangan yang menggunakan pembangunan pasar.
- 3) *Biaya Listrik.* Penggunaan listrik di Pasar Jember di hitung sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Dinas Pasar.
- 4) *Biaya MCK (mandi, cuci, kakus).* MCK merupakan sarana penting demi kelangsungan aktifitas pasar dan sebagai salah satu wujud fisik pelayanan pasar.
- f. *Retribusi Kebersihan.* Retribusi kebersihan yang dimaksud disini adalah retribusi sampah. Retribusi persampahan di pasar Jember tidak ditangani oleh cabang dinas namun atas kesepakatan bersama antara pedagang dan pemerintah , persampahan ini di kelola oleh Puskoppas (Pusat Koperasi Pedagang Pasar) unit kebersihan.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan pembeli secara langsung.¹⁹ Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit.

¹⁹ *Ibid . 2*

Adapun macam-macam pasar tradisional yaitu:

1. Proses jual beli dan lain-lain melalui proses tawar menawar harga.
2. Barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur di rumah tangga.
3. Harga barang yang diperjual bahkan relatif murah dan terjangkau.
4. Area pasar tradisional biasanya ditempat terbuka.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).²⁰

Adapun macam-macam Pendapatan Asli Daerah yaitu:

a. Pajak

1) Pengertian Pajak

Untuk dapat memahami pentingnya pemungutan pajak dan alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan membayar pajak yang terutang, tentunya perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pajak. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya

²⁰ *Ibid.* 83

dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.²¹

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Salah satu ahli yang disebutkan dalam buku *Pengantar II-mu Hukum Pajak* yang ditulis oleh R. Santoso Brotodihardjo adalah Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari Perancis, dalam bukunya yang berjudul *Traite de la science des Finances*, 1906 mengemukakan: “ pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.²²

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, *pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Dari beragam pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan ditambah dengan definisi resmi

²¹ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan surat Paksa*, (Jakarta: PT RajaGarafindo Persda, 2004), 5.

²² Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan & Akutansi Pajak*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 6

pajak yang terdapat dalam Undang-undang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:²³

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.
- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berbunyi “

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang diklakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

²³Daru Anondo, *Perpajakan di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 6.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁴

Menurut pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 objek pajak daerah meliputi:²⁵

- 1) Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaran bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak penerangan jalan
 - f) Pajak mineral bukan logam atau batuan
 - g) Pajak parkir

²⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), 13.

²⁵Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001.

- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶ Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan dimana retribusi jalan tersebut dipungut. Demikian juga retribusi parkir karena ada pemakaian ruangan tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000

disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁷

1) Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain:²⁸

- a) Pelayanan kesehatan
- b) Pelayanan kebersihan dan persampahan
- c) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
- d) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Pelayanan pasar
- g) Pelayanan air bersih
- h) Pengujian kendaraan bermotor
- i) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j) Penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah

²⁷Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 87-94.

²⁸Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 129

k) Pengujian kapal perikanan

Retribusi jasa umum ini di samping sebagai sumber pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai alat pengatur. Misalnya untuk daerah yang padat lalu lintasnya sehingga sangat rawan kemacetan dapat dikenakan retribusi parkir yang lebih tinggi daripada daerah yang kurang padat lalu lintasnya.

2) Retribusi jasa usaha

Yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.²⁹

Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah
- b) Pasar grosir atau pertokoan seperti, tempat pelelangan ikan, ternak, bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan oleh pemerintah daerah
- c) Pelayanan terminal
- d) Pelayanan tempat khusus parkir
- e) Pelayanan tempat penitipan anak

²⁹ *Ibid*, 130.

f) Penginapan atau pesanggrahan/vila, dll.

3) Retribusi perijinan

Seperti halnya dengan pajak, retribusi perijinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan di samping sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun, hanya perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya yaitu:

- a) Ijin peruntukan penggunaan tanah
- b) Ijin mendirikan bangunan (IMB)
- c) Ijin trayek
- d) Ijin pengambilan hasil hutan
- e) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol.

4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:³⁰

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah

³⁰Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan dan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 73

- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Fasilitas sosial dan fasilitas umum

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.³¹

³¹ *Ibid*, 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*), yang mana penelitian ini lebih kepada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.³¹

Penelitian ini akan dilakukan di DISPERINDAG di Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini karena adanya permasalahan dalam Analisa Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember yaitu apakah pemungutan retribusi pasar dan di Kabupaten Jember telah efektif dan berapa besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember sudah mengikuti Undang-undang yang berlaku saat ini.

³¹Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang yang mempunyai wewenang/kekuasaan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti.³²

Dalam penelitian ini subyek yang akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Eko staf Ka. Sub Disperindag
2. Ibu Nengsih Staf Sekretariat Disperindag
3. Ibu Mala dan Ibu Indah Staf Sistem Umum, Kasubit Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.³³

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

³²Sugiyono, *Metode*, 218.

³³Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 93.

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁴ Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian datang ke tempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁵ Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Letak Pasar Tradisioanl
- b. Proses Parkir di Pasar Tradisional
- c. Penataan Lahan Parkir Pasar Tradisional

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.

Adapun data yang akan diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

³⁴Djam'an satori. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014),104.

³⁵Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2013), 73.

³⁶Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

- 1) Efektifitas retribusi pasar
- 2) Kontribusi retribusi pasar
- 3) Pendapatan Asli Daerah

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, noyulen, dan sebagainya.³⁷ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip, majalah dan lain sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Jumlah Pasar Tradisioanal di Kabupaten Jember
- b. Pendapatan Asli Daerah

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁸

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2010),274.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut³⁹:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data. Data yang sudah direduksi data akan lebih memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau Verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber atau perbandingan data. Teknik triangulasi yang paling

³⁹Satori.Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 218-220.

banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁰

G. Tahap-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap pra-lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangn
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian

⁴⁰ Meleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 178.

2. Tahap pekerjaan lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Pembatasan latar dan peneliti
 - c. Penampilan
 - d. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
 - e. Jumlah waktu studi
3. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
4. Berperan serta sambil mengumpulkan data Mencatat data dan Analisis di lapangan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Sejarah awal berdirinya, Dinas perindustrian, perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral sering berganti nama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1957 ditetapkan dengan nama Departemen Perdagangan sebagai salah satu lembaga bidang perdagangan di Indonesia, yaitu tentang pemerintahan Kementerian Perekonomian menjadi Kementerian Perindustrian yang berlaku sejak tanggal 9 April 1957.⁴¹

Kemudian sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 24 Maret 1956 tidak dijumpai adanya Kementerian Perdagangan atau Menteri Perdagangan, yang ada adalah Kementerian Kemakmuran, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Industri yang muncul silih berganti sehingga pada tanggal 9 April 1957 dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Pada tanggal 27 Agustus 1964 dipakai setelah Menteri Perdagangan dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1966, Kementerian Perdagangan dipecah menjadi Departemen Koperasi. Selanjutnya dari tanggal 29 Maret 1978 sampai tanggal 27 Maret 1983, Departemen Perdagangan berubah namanya menjadi Departemen

⁴¹Dokumentasi Disperindag Kabupaten Jember 2017

Perdagangan dan Departemen Koperasi. Pada Kabinet Pembangunan IV yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 1983 Departemen yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 388/M tahun 1996. Kemudian Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian digabung menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada tanggal 1 Januari 2001 dengan berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 Departemen Perindustrian dan Perdagangan berubah status menjadi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember berdasarkan peraturan Daerah nomor 74 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000. Selanjutnya sebagai implementasi dari PP VIII tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 23 tahun 2003, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.

Pada tanggal 1 Januari 2009 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 15 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut mencakup perubahan struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan ; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis dan administratif yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian Dan Perdagangan.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris, mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan ;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga ;
- 6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 8) Pengelolaan kearsipan dinas ;
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 10) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kehumasan, kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- b) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat , penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
 - 2) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - 3) Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - 4) Persiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - 5) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- c) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- d) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

- 1) Penghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
- 2) Pelaksanaan pengolahan data ;
- 3) Pelaksanaan perencanaan program ;
- 4) Penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- 5) Penghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 7) Pelaksanaan penyusunan laporan;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 9) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 10) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

c. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Industri, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk.
- 2) Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, bimbingan Teknis pembinaan , pengembangan sarana usaha , produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk.
- 3) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk.;
- 4) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri Agro, Kimia, Logam , Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk;
- 5) Penyiapan Monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usahadi bidang industri Agro, Kimia, Logam, Mesin, elektronika, Industri Tekstil, Aneka dan desain Produk;
 - a) Seksi Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan

mengevaluasi serta melaporkan Industri Argo dan Kimia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Argo dan Kimia mempunyai fungsi

- 1) Penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- 2) Perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang Agro Dan Kimia;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi dibidang Agro Dan Kimia,
- 6) Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dibidang Industri Agro Dan Kimia;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dibidang agro dan kimia;
- 8) Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;

- 9) Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- 10) Pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri.
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika, mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan Industri Logam Mesin dan Elektronika
 - b) Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Logam Mesin dan lektronika mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
 - 2) Perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
 - 3) Perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;
 - 4) Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri, logam, mesin dan elektronika;
 - 5) Penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang logam, mesin dan elektronika;

- 6) Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri logam, mesin dan elektronika;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- 8) Penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penarapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- 9) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dibidang logam, mesin dan elektronika;
- 10) Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- 12) Pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- 13) Penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;

- 14) Pemberian fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- 15) Pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif.
- a) Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- b) Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
 2. Perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
 3. Perencanaan dan pelaksanaan uji publik rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan;

4. Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
5. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk
6. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
7. Penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
8. Penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penarapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
9. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Tekstil, Aneka dan Desain Produk;
10. Penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
11. Perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;

12. Pengkordinasian dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
13. Pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
14. Penyusunan informasi dan penganalisa ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
15. Pemberian fasilitasi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;

d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

- 1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kegiatan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- b) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan fasilitasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- e) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang;
- g) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan.
- h) Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- i) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.

- j) Pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi.
 - k) Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting.
 - l) Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya.
 - m) Penyusunan standart operasional prosedur bagi perijinan
 - n) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan.
 - o) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- 2) Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bina Pasar dan Distribusi Barang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan rencana kegiatan bina pasar dan distribusi barang;
 - b) Penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- c) Penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar dan distribusi barang;
- d) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e) Penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten;
- f) Perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok;
- g) Pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang;
- i) Perencanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.

(1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Usaha

(2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan;
- d. Perencanaan sosialisasi sop layanan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan.
- e. Pelaksanaan penerbitan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

(3) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.

(4) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
2. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
3. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum;
4. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pembentukan dan
5. Fasilitasi Operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Petugas Pengawas Peredaran Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
dan

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

e. Bidang Perdagangan Internasional

Bidang Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan/ mengembangkan promosi dan kerja sama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan Internasional, mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan internasional;
- 2) Pelaksanaan bimbingan di bidang perdagangan internasional;
- 3) Pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan pengendalian impor;
- 4) Penyebaran informasi, promosi dan kerjasama perdagangan internasional;
- 5) Pelaksanaan koordinasi di bidang perdagangan internasional;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor;
- 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

a) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Ekspor dan Impor serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Untuk melaksanakan tugas Seksi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :

- 1) Penganalisaan konsep pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala lintas daerah Kabupaten/kota/provinsi serta negara tujuan
- 2) Perencanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor serta pengendalian impor ;
- 3) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor ;
- 4) Penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan impor serta angka pengenal impor ;
- 5) Penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan verifikasi bahan impor ;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor
- 7) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengawasan mutu barang ekspor dan mutu barang impor ;
- 8) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor dan impor ;

9) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan promosi serta kerjasama perdagangan internasional;

b) Penyusunan rencana pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor;

c) Penyusunan rencana pameran dagang nasional bagi produk unggulan ekspor;

d) Perencanaan pelatihan bagi para calon eksportir;

e) Penyusunan rencana pelaksanaan misi dagang bagi produk unggulan ekspor;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Struktur Organisasi

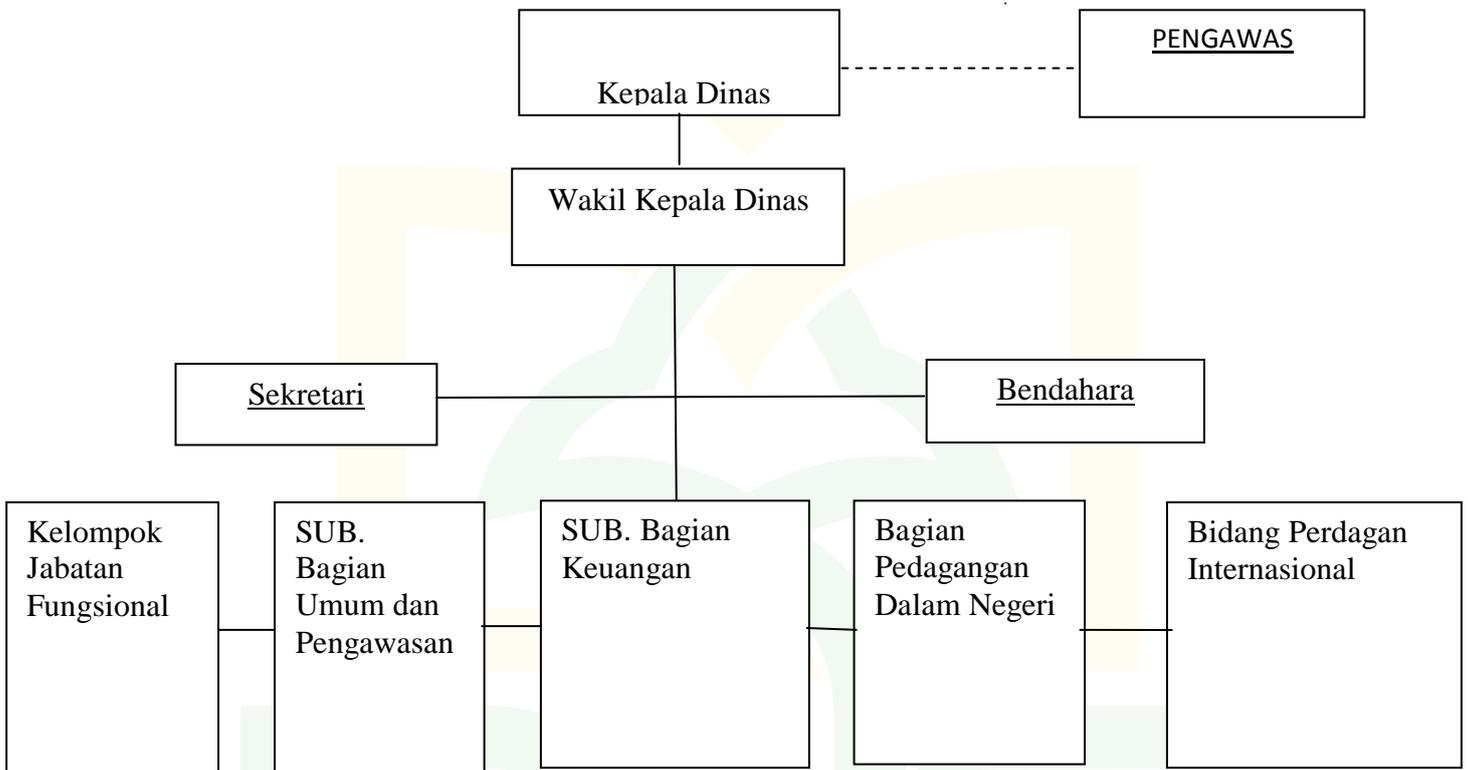
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember, kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Jember yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.⁴²

Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut adalah struktur organisasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

⁴² Bapak Eko , *Wawancara*, Jember, 08 Agustus 2017

Gambar. 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER



h. Sumber Daya

Dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

i. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh personil sebanyak 64 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Dinas : 1 orang

Sekretariat

1. Sekretaris : - orang

2. Struktural / Ka Sub. Bagian : 2 orang

3. Staf/Honoror : 21 orang

4. Fungsional : - orang

Bidang Industri

1) Kepala Bidang : 1 orang

2) Struktural / Kepala Seksi : 2 orang

3) Staf/Honoror : 7 orang

4) Fungsional : 4 orang

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. Kepala Bidang : - orang

2. Struktural / Kepala Seksi : 1 orang

3. Staf : 10 orang

4. Fungsional : 1 orang

Bidang Perdagangan Internasional

1) Kepala Bidang : 1 orang

- 2) Struktural / Kepala Seksi : 1 orang
- 3) Staf : 4 orang
- 4) Fungsional : - orang

UPT Metrologi

- 1. Kepala UPT : - orang
- 2. Staf : 5 orang
- 3. Fungsional : 3 orang

j. Sarana Dan Prasarana

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh keberadaan kantor yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 82 Kecamatan Sumbersari, Telpn (0331) 334497 Kabupaten Jember beserta prasarana kerja pendukung.

k. Kinerja Pelayanan

Pembangunan perindustrian diarahkan kepada terbukanya peluang usaha, tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, peningkatan kewirausahaan serta promosi. Pembangunan industri sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi memiliki peranan penting sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi daerah dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas

kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu keberhasilan pembangunan urusan industri dicerminkan oleh jumlah industri formal dan industri non formal. Jumlah industri kecil mengalami penurunan jumlah karena adanya pergeseran menjadi industri formal. Sedangkan industri formal (TDI dan IUI) mengalami kenaikan karena adanya tambahan industri baru maupun perubahan dari industri non formal.⁴³

Tabel. 4.1.
Data Pasar Tradisional Kabupaten Jember

NO	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Hari Buka Pasar	Jumlah Pedagang
1	Tanjung	Jl. Samanhudi No 492 Jember	1971	Setiap Hari	2.665
2	Gebang I	Jl. Melati No 20 Jember	1985	Setiap Hari	219
3	Gebang II	Jl. Melati No 20 Jember	1970	Setiap Hari	225
4	Kreyongan	Jl. Dr. Subandi Jember	1960	Setiap Hari	176
5	Patrang	Jl. Slamet Riyadi Jember	1970	Setiap Hari	57
6	Kepatihan	Jl. Trunojoyo Jember	2002	Setiap Hari	131
7	Sukorejo	Jl. Suparman 232 Jember	1978	Satiap Hari	40
8	Mangli	Jl. Brawijaya 68 Jember	1976	Setiah HARI	175
9	Tegal Besar	Jl. Basuki	1998	Setiap	89

⁴³ Bapak Septiantono, *Staf Kepala Bidang* 09 Agustus 2017

		Rahmat 12 Jember		Hari	
10	Pasar Bungur	Jl. Bungur Je4mber	2003	Setiap Hari	32
11	Pasar Burung	Jl. Kenanga Jember	1993	Setiap Hari	502
12	Rambipuji	Jl. Wahidin	1978	Setiap Hari	192
13	Jenggawah	Jl. Raya Kawi 31	1970	Setiap Hari	306
14	Petung	Jl. Surabaya	1977	Setiap Hari	18
15	Bangsalsari	Jl. Stasiun No 12 Jember	1950	Setiap Hari	222
16	Tanggul	Jl. Tanggul	1991	Setiap Hari	335
17	Manggisan	Jl. HOS Cokro Minoto	1991	Setiap Hari	178
18	Puger	Jl. Pantai 5 Puger	1960	Setiap Hari	251
19	Umbulsari	Jl. Ahmad Yani No 13 Umbl	1932	Setiap Hari	118
20	Menampu	Jl. Raya Puger	1960	Setiap Hari	50
21	Geladak Merah	Jl. Raya Puger 50 Jember	1980	Setiap Hari	138
22	Balung	Jl. Rambipuji No 17 Balung	1965	Setiap Hari	401
23	Ambulu	Jl. Raya Suyitman Ambulu	1979	Setiap Hari	439
24	Kalisat	Jl. Diponegoro	1994	Setiap Hari	668
25	Sukosari	Jl. Kalisat jember	1950	Setiap Hari	26
26	Sukowono	Jl. Ahmad Yani Sukowano	1965	Setiap Hari	120
27	Mayang	Jl. Rawung No 182	1960	Setiap Hari	74

		Mayang			
28	Sempolan	Jl. Pb Sudirman 118	2002	Setiap Hari	168
29	Balung Kulon	Jl. Raya Puger No 02	2004	Setiap Hari	177
30	Wirolegi	Mt Haryono	1974	Setiap Hari	155
31	Pasar Saptuan	Jl. Basuki Rahmat	1967	Setiap Hari	158
32	Pasar Patilungo	Jl. Kota Blater	1954	Setiap Hari	135
33	Pasar Arjasa	Jl. Arjas	1932	Setiap Hari	154
34	Gemuk Emas	Jl. Jalan Gumuk Emas	1980	Setiap Hari	209
35	Pasar Jelbuk	Jl. Jelbuk	2004	Setiap Hari	120
36	Pasar Jombang	Jl. Jombang	1950	Setiap Hari	345
37	Pasar Panti	Jl. Panti	1965	Setiap Hari	158
38	Pasar Silo	Jl. Silo	1977	Setiap Hari	668
39	Sumber Baru	Jl. Sumber baru	2003	Setiap Hari	453
40	Pasar Wuluhan	Jl. Pasar Wuluhan	1971	Setiap Hari	193
42	Batu urip	Jl. Batu urip	1985	Setiap Hari	166
43	Pasar Hewan	Jl. Pasar Hewan	1998	Setiap Hari	167

Sumber: Dokumen DISPERINDAG

Tabel 4.2

Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2016

Klasifikasi	Tahun		
	2014	2015	2016
Industri Non Formal			
- Unit	40.792	40.792	40.792
- Tenaga Kerja	93.244	93.244	93.244
Industri Formal			
TDI			
- Unit	2.738	2.915	3.044
- Tenaga Kerja	29.170	30.279	30.982
IUI			
- Unit	491	536	597
- Tenaga Kerja	18.941	25.956	28.279

Sumber : Dokumen DISPERINDAG Kabupaten Jember

Urusan perdagangan diarahkan kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif, terbukanya peluang usaha, perlindungan konsumen, ketersediaan dan terjangkauanya kebutuhan pokok masyarakat.

Pembangunan urusan perdagangan dicerminkan oleh indikator-indikator diantaranya adalah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) baik untuk perusahaan besar, menengah, kecil, nilai investasi, jumlah tenaga

kerja yang dapat diserap, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk berbagai bentuk perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Tabel 4.3

Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Golongan Perusahaan			
	a. Besar	-	28	-
	b. Menengah	82	176	83
	c. Kecil	1.199	1.681	915
	d. Mikro	-	-	-
2	Nilai Investasi (Rp.000)	340.243.57 3	312.936.70 2	304.074.684
3	Jumlah Tenaga Kerja	5.233	2.933	2.395
4	Pembukaan Cabang	2	2	-

Sumber : Dokumen Disperindag Labupaten jember

Tabel 4.4

Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG Tahun 2014 – 2016

Bentuk Perusahaan	Tahun		
	2014	2015	2016
PT	122	269	94
CV	226	457	282
Koperasi	18	47	7
Perseorangan	1.057	1.197	756
Lainnya	0	1	-
Jumlah TDP	1.423	1.971	1139
TDG	19	38	17

Sumber : Dokumen Disperindag Kabupaten Jember.

1. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kabupaten Jember sebagai kabupaten agraris, memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah. Perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Sektor Pertanian memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Jember masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pergeseran lapangan usaha terjadi di posisi kedua dari sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor menjadi Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,92 persen; kemudian lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 21,37 persen; lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 12,07 persen; diikuti lapangan usaha lain sebagaimana tabel berikut.

2. Visi Dan Misi

Adapun Dinas Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) Jember memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan yaitu:

a. Visi

Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri.

b. Misi

Yang ditetapkan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan;

- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustry dan Industrialisasi secara Berkelanjutan.

3. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing.⁴⁴ Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah bersekala besar, kelembagaan yang dulunya kecilsekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan penampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuk otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapata Daerah sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seseorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapata Daerah

⁴⁴ Dokumentasi Dispenda Kabupaten Jember 2017.

bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawah dan bagaimana instansi tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
- b. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
- c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah;
- d. Memenuhi pamasukan daerah.

5. Organisasi

a. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur

organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk tugas dan wewenang masing-masing bagian:

1) Ketenagakerjaan (Job description)

Secretariat mempunyai fungsi:

- a) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji, pegawai dan inventarisasi;
- e) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- f) Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

b). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- 2) Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan relisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- 3) Melaksanakan perhitungan anggaran verifikasi;
- 4) Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 5) Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- 7) Menerima dan meyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);
- 8) Melakukan pembinaan administrasi keuangan;

c). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.
- 2) Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- 3) Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- 5) Meyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
- 6) Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 7) Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

d). Bidang Pendapatan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- 2) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- 5) Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

e). Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah;
- b) Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah dilapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya;
- c) Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak;
- d) Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sekto Pedesaan dan Perkotaan lainnya;
- e) Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
- g) Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir dalam pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) Menetapkan No Wajib PAjak Daerah (NWPJ);
- i) Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan;
- j) Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya;

k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban;

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikn oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran

f). Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

b) Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya;

c) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan diwilayah Kabupaten Jember;

d) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

g). Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi;

1) Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

2) Menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Memberikan legalisasi terhadap obyekpajak daerah dan retribusi daerah;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h). Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunya tugas:

- 1) Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang telah disetujui;
- 3) Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- 4) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- 5) Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- 6) Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 7) Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Membuat Direktorat Jenderal Pajak dan penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Terhubung (SPPT) PBB;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaantugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 10) Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

i). Seksi Verifikasi mempunyai tugas:

- 1) Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi;
- 3) Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah Yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Dearah dan Retribusi Daerah;
- 5) Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahserta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.
- 6) Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (LBB) sector pedesaan dan perkotaan;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- 8) Melakukan tugas dinas lain yang diberika oleh Kepala Bidang Penetapan dan verifikasi.

j). Bidang Operasional mempunyai tugas:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan dengan penerimaan bagi hasil dan buka pajak;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

k). Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta penghimpun pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- 2) Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi maupun pusat;
- 3) Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggaknya;
- 4) Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

l). Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , mempunyai tugas;

- 1) Menyiapkan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Melayani permohonan keberata/ keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberika oleh Kepala Bidang Operasional.

m). Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- 1) Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- 3) Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

5) Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan bnda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan ;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

n). Seksi pembukuan penerimaan dan persediaan, mempunyai tugas:

1) Menerima serta mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan Pajak lainnya;

2) Mancatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;

3) Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;

4) Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;

5) Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;

6) Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;

7) Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat dokumen penagihan;

- 8) Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 9) Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
- 10) Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- 11) Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

o). Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:

- 1) Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sekto Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sekto Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku;

- 4) Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

p). Lokasi (Alamat)

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang menjadi tempat obyek penelitian dalam skripsi ini terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, propinsi Jawa Timur. Berikut alamat lengkap

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Alamat : Jalan Jawa No. 72 Jember

Telepon : (0331)337112

q). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

- 1) Gedung
- 2) Alat tulis kantor
- 3) Computer
- 4) Ruang penyimpanan uang

- 5) Lahan parkir
- 6) Mesin penghitung uang
- 7) Mushola
- 8) Kursi tunggu bagi nasabah.

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa di hentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpul data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Efektifitas Retribusi Pasar Tradisional

a) Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

1) Prosedur Pemungutan Retribusi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (DIPENDA) menetapkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut dikepalai oleh seorang kepala pasar yang ditempatkan di setiap pasar, kepala pasar tersebut diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember. Seorang kepala pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap distribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala pasar

mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang.

Retribusi pasar yang ditarik setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang dipasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dipasar. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, MCK, mushala, air, listrik, bak sampah, parker, lokasi bungkar muat barang dagangan dan saluran air.⁴⁵

Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut diatas, maka penetapan tarif retribusi juga didasarkan pada kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

2) Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembinaan Pasar

Pasar pemda diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan disetiap pasar. Sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Dispenda dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar.

⁴⁵ Ibu Indah, *Wawancara*, Jember, 07 Agustus 2017

Kepala Pasar Pemerintah disamping mengurus dan mengelolah pasar pemerintah juga mengelolah pasar desa diwilayahnya dalam hal tertib adminitrasinya, kepala pasar bertanggung jawab kepada Kepala DIPENDA.

Pembinaan tidak dilakukan oleh kepala pasar, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini dilakukan karena pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semeraut.

3) Alur Dan tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut oleh petugas KPP dengan menggunakan sistem *official assessment*, yaitu pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan sitem pemungutan secara langsung menggunakan benda berharga atau karcis. Bagi pedangan yang tidak bayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenai sanksi adminitrasi sebesar 2 persen perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).⁴⁶

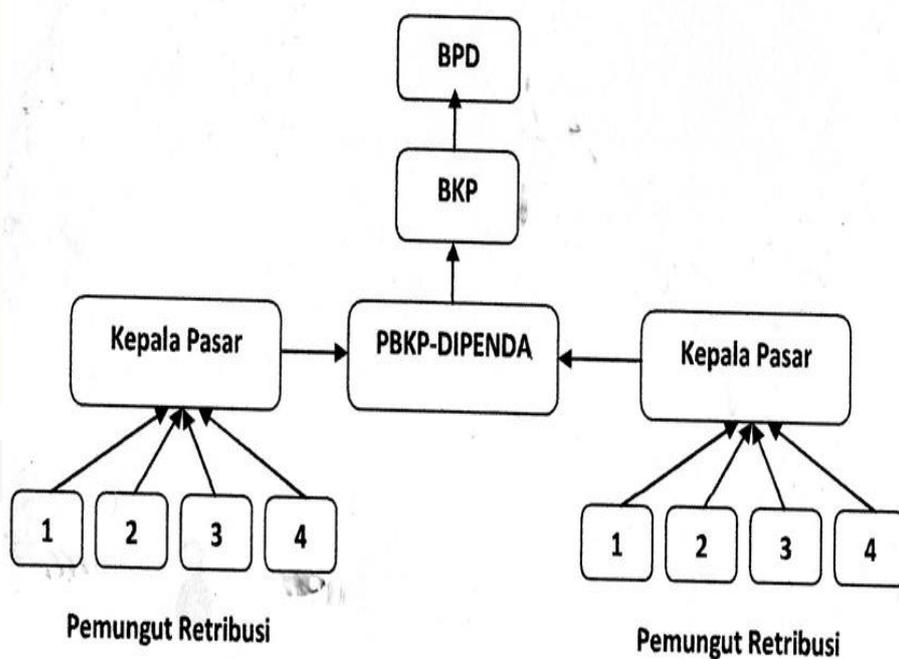
Dalam pemungutan pedagang harus mematuhi peraturan peraturan Bupati sebagai berikut.

⁴⁶ Ibu Novi, *Wawancara* 08 Agustus 2017

- b) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- c) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d) Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Bupati

Gambar. 4.2.

Sistem Laporan Retribusi Pasar Di Kabupaten Jember



Keterangan

BPD : Bank Pembangunan Daerah

BKP : Bendahara Khusus Pemerintah

PBKP : Pembantu Bendahara Khusus Pemerintah

DIPENDA : Dinas Pendapatan Daerah

Penjelasan singkat dari sistem laporan Retribusi Pasar, adalah sebagai berikut: Melalui Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember ditunjuklah beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi di pasar, mereka bertugas menarik retribusi.⁴⁷ Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke Dispenda Kabupaten Jember. Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan (PBKP) setelah perhitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendahara Khusus Penerimaan yang ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah.

Setelah Laporan Retribusi Pasar di wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) Pemungutan Retribusi

Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik ada didalam area pasar ataupun yang berada di rayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.

⁴⁷ Bapak Septantono, *Wawancara* 09 Agustus 2017

2) Coordinator atau Kepala Pasar

Mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpansetoran dari para pemungut retribusi, lalu menyetorkannya ke Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) . Uang retribusi tersebut dikumpulkan oleh pembantu bendaharawan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) .

3) PBKP-KPP Pembantu Bendahara Khusus Penerima-KPP Pembantu

Bendaharawan Khusus Penerima ini bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat semua uang retribusi yang masuk diseluruh pasar yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar. Setelah perhitungan dan pencatatanselesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) PBKP harus menyetorkan uang retribusi pasar selambat-lambatnya 6 hari kerja.

4) BKP (Bendahara Khusus Penerima)

Menerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember .

5) BPD (Bank Pembangunan Dearah)

Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) . BPD juga berlaku sebagai pemegang kas daerah.

4) Tata Cara Penyetoran

Bupati selaku Kepala Daerah telah menetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat terutang. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke BPD selaku pemegang kas daerah ataupun melalui Kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

5) Tata Cara Penagihan

Penagihan dapat dilakukan pada wajib retribusi dengan menggunakan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan yang dilakukan tujuh hari sejak awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan wajib retribusi harus menulisi retribusi yang terutang. Surat Tagihan ini dilakukan oleh Bupati.⁴⁸

6) Pengukuran Efektivitas Retribusi Pasar

Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasarselam 3 tahun anggaran terakhir dari seluruh pasar yang terdapat di Kabupaten Jember. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan retribusi pasar akan diperbandingkan dengan target penarikan retribusi pasar. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin

⁴⁸ Ibu Mala , *Wawancara*, Jember 10 Agustus 2017

besar (di atas 100 persen), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif.

Tabel tersebut dibawah ini memeperlihatkan rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Jember adalah sebesar 98,44 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif pada tahun 2014 dan 2015 kecuali pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 101,15 angka terendah padah tahun 2014 yang hanya mencapai realisasi sebesar 96,86 persen. Hal ini pula mendasari sehingga target pada tahun 2016 diturunkan sebab selama dua tahun terakhir tidak bisa mencapai target 100 persen.

Tabel. 4.5

Efektifitas Retribusi Pasar Tradisional

No	Tahun	Retribusi Pasar		Efektivitas (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2014	4.720.000.000,00	4.571.887.290,00	96,86
2	2015	5.020.000.000,00	4.906.078.460,00	97,73
3	2016	5.072.860.900,00	5.131.452.400,00	101,15
Rata-rata				98,58

Sumber: Dokumen Diolah

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ pasar}{Target\ retribusi\ pasar} \times 100\ %$$

Target retribusi pasar

Tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 101,15 persen, hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan selama ini ditetapkan Pemda Kabupaten Jember masih berada dibawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah selaku dinas

Yang terkait dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaan retribusi pasar berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar diperlukan antara lain suatu kejadian dan perhitungan-perhitungan beberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui beberapa besar peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu (alat analisis) dengan menggunakan formula kontribusi/share dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dikalikan dengan 100 persen.

Rumus tersebut diatas akan diimplementasikan secara lebih singkat dan lebih jelas dengan menggunakan tabel untuk lebih efektifnya data.

Retribusi pasar di Kabupaten Jember merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang memberikan peranan atau kontribusi yang cukup berarti/besar terhadap retribusi daerah yaitu seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.6**Kontribusi Pasar Tradisional**

No	Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2014	4.571.887.290,00	62.582.757.396,00	73,05
2	2015	4.906.078.460,00	34.447.943.109,00	14,24
3	2016	5.131.452.400,00	36.311.518.801,00	14,30
Rata-rata				33,86

Sumber: Dokumen Diolah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar} \times 100\%}{\text{Retribusi Daerah}}$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah cukup berarti yaitu selama periode waktu 2014 s/d 2016 rata rata per tahun sebesar 33,86 persen, ini berarti bahwa penerimaan retribusi daerah selama periode waktu tersebut menunjukkan kecenderungan menurun dengan kisaran antara 58,81 persen pada tahun anggaran 2015, selama periode waktu tersebut peranan kontribusi retribusi pasar secara persentase mengalami penurunan dan pada tahun 2016 mengalami retribusi peningkatan sebesar 0,06 persen dari tahun sebelumnya.⁴⁹

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 3 thun anggaran yaitu periode 2014 sampai dengan 2016 adalah seperti pada tabel sebagai berikut.

⁴⁹ Ibu Indah ,*Wawancara Staf sekretarian, Jember, 07 Agustus 2017*

Tabel. 4.6**Kontribusi Pasar Tradisional Terhadap PAD**

No	Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2014	4.571.887.290,00	441.605.617.222,69	53,31
2	2015	4.906.078.460,00	462.457.671.769,93	60,85
3	2016	5.131.452.400,00	524.137.897.016,96	97,89
Rata-rata				70,68

Sumber: Dokumen Diolah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar} \times 100\%}{\text{Retribusi PAD}}$$

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi atau share retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2014 – 2016 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yaitu rata-rata berkisar 70,68 persen.

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang di capai pada tahun 2015 hanya naik sebesar 7,54 persen sedangkan pada tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan tingkat retribusi sebesar 37,04 persen dari tahun sebelumnya, hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi pasar sebagai salah satu komponen retribusi daerah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 70,68 persen per tahun yang berasal dari retribusi pasar.

C. Pembahasan Temuan

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa PAD Kabupaten Jember Retribusi Pasar di Kabupaten Jember dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember. Sumber PAD diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah, seperti pembangunan.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi pasar. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember memiliki peranan cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya. Salah satu sumber-sumber PAD yang potensial adalah dari sektor jasa perpasaran.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangkah untuk

memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunann daerah. Dengan melihat perolehan retribusi pasar yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pasar, terlihat adanya potensi retribusi pasar yang belum digalih secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

1. Peranan Retribusi Pasar terhadap (PAD) Kabupaten Jember

Retribusi pasar di Kabupaten Jember pada tahun 2014 mendapatkan Rp. 4. 571.887.290,00., dari jumlah PAD Kabupaten Jember sebesar Rp. 4. 720.000.000,00. Persentase hasil retribusi pasar inilah yang ikut menunjang PAD. Sedangkan Pad itu sendiri merupakan salah satu pendapat yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah. Pembangunan daerah, belanja daerah dan lain-lain.

Berdasarkan data Pada Kabupaten Jember dari Tahun 2014 hingga 2016, dalam kurung waktu 3 tahun tersebut APBD Kabupaten Jember terus mengalami difisit. Target PAD dan realisasinya setiap tahunnya selalu meleset. Hal ini, berbeda dengan PAD Kabupaten Jember yang setiap tahunnya justru mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagi kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kabupaten Jember sebagai bagian dari propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang sangat cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai bidang. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Jember itu sendiri. Kemampuan keuangan daerah didalam membiayayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan pemerintah Kabupaten Jember dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Retribusi Pasar juga ikut berperan dalam menunjang pembangunan daerah. Karena pasar juga salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen lainnya dalam menunjang PAD.

2. Upaya Pemda Kabupaten Jember mengoptimalkan PAD dari sektor Retribusi Pasar

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan los, kios, dasaran terbuka, biaya administrasi ijin penggunaan pembangunan pasar, biaya listrik, biaya MCK dan kebersihan.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan retribusi pasar dilapangan masih belum terlaksana dengan optimal yang diebabkan oleh:

- a. Lemahnya pengawasan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember.
- b. Kurang optimalnya kinerja petugas pasar.
- c. Kurangnya kedisiplinan masyarakat untuk mentaati ketentuan pasar karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur tentang pasar.
- d. Adanya konflik kepentingan antar pengelola retribusi pasar ditepi jalan umum.
- e. Munculnya pasar liar yang tidak terdata secara resmi.
- f. Terbatasnya prasarana pengelolaan pasar ditepi jalan umum karena keterbatasan ruang pasar.
- g. Masih banyak petugas pasar yang belum memahami peraturan tentang retribusi perpasaran
- h. Lemahnya sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum petugas retribusi pasar yang hanya dilakukan pembinaan dan pengarahan

Petugas Pengelola Pasar sehingga menyebabkan masih banyak petugas pasar yang tidak disiplin.

- i. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru pasar dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi di Kabupaten Jember ini menjadi sangat penting mengingat, berdasarkan pantauan yang dilakukan peneliti di berbagai tepi jalan umum yang ada di Kota Jember yang digunakan oleh beberapa oknum untuk meraih untung pribadi dari para pedagang, antara lain:⁵⁰

- 1) Depan toko-toko, dimana tempat tersebut digunakan lahan perdagangan oleh beberapa pedagang dan meminta pembayaran retribusi pasar. Tetapi ketika ditanya surat izin pemungutan dari pemerintah tentang penarikan retribusi pasar di tempat tersebut dia tidak menunjukkannya jadi kesanya hanya menggunakan momen untuk mendapatkan uang. Jam kerjanya pun sangat tidak jelas.
- 2) lahan pedagang ditepi jalan ditempat tersebut juga dikenakan retribusi pasar. Lain halnya di area tersebut. Memang penataanya cukup teratur tetapi keamanan tidak ada jaminan dari petugas pasar. Dan tentu saja mereka tidak dapat menunjukan surat izin dari pemerintah dan tarifnya pun tidak sesuai dengan tarif retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁵⁰ Bapak Eko, *Wawancara*, 11 Agustus 2017

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember dapat diambil dari kesimpulan sebagai berikut.

1. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten jember adalah sebesar 98,58 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif karena dalam dua tahun anggaran, angkanya hamper tidak melampaui angka 100 persen dan hanya pada tahun 2016 melampaui 100 persen dan ini pun di sebabkan karena target dari sebelumnya dikurangi.
2. Kontribusi retribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember selama Tahun anggaran 2014-2016 adalah rata-rata sebesar 70,68 persen sedangkan kontribusi terhadap retribusi daerah adalah sebesar 33,86 persen. Peranan atau kontribusi tersebut masih kurang efektif sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah. Potensi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2016 lebih rendah dari target yang telah di tetapkan yaitu target untuk tahun 2016 sebesar Rp. 5.131.452.400,00.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam

meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai potensi yang ada dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan pengawasan dilapangan;
 - b. Menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para pemilik kios, los atau peralatan yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan;
 - c. Memeberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara biaya-biaya yang tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan di usahakan lebih rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi penerimaan sehingga dari tahun ke tahun pungutan retribusi pasar menunjukkan adanya peningkatan efisiensi.
3. Pemerintah kabupaten Jember agar realistis dalam menentukan atau menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya. Pengenaan tarif retribusi pasar di sesuaikan dengan tingkat layanan yang di berikan kepada para wajib retribusi seperti tarif untuk kios, los, dan pelataran harus di tinjau ulang

bukan berdasarkan luas saja tapi berdasarkan tingkat keramaian dan potensi dan transaksi pembelian barang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dkk. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali.
- Anondo, Daru. 2013. *Perpajakan di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bratukusumah, Deddy Supriyady. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hadi, Amirul & Hariyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibu Novi, *Wawancara Staf Sekretariat Disperindag, Jember 08 Agustus 2017*
- Ibu Indah, *Wawancara Staf sekretarian Dipenda, Jember, 07 Agustus 2017*
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Riwo Kaho, Josef. 1998 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Karim. A . Adirwarman. 2014. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komariah. Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Meleong. J, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahdliyyulizza. 2010. *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akutansi Pajak*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Prakosa. Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stiawan. Setu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Siahaan, P. Marihot. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persda.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satori, Djam'an. Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*
- Tohari, Sohib Muhammad. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Mushaf Al-Azhar.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan dan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000.

IAIN JEMBER

MATIRK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016	1. Retribusi pasar	1. Retribusi pasar	a. Ritribusi bangunan pasar b. Biaya adminitrasi ijin penggunaan bangunan pasar c. Biaya listrik d. Biaya MCK (mandi, cuci, kakus) e. Retribusi kebersihan	a. Informan: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala dinas PAD dan karyawan • Kepala dinas pasar dan karyawan b. Dokumentasi c. Kepustakaan d. Internet	1. Pendekatan Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif 2. Jenis penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Lapangan(<i>Field Research</i>) Studi Kasus 3. Metode PengumpulanData: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi • Internet 4. Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif kualitatif 	1. Bagaimana efektifitas retribusi di Kabupaten Jember ? 2. Berapa beasar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendatan Asli Daerah di Kabupaten Jember?
	2. Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	a. Pasar Jual beli dll melalui proses tawar menawar harga b. Barang yang dijual umumnya keperluan memasak dapur dan rumah tangga c. Harga barang yang dijual belikan relatif murah dan terjangkau d. Arena pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka			



Nomor : B45/In.20/7.a/PP.00.9/082017
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota
 Jember

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu
 pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Moh. Yasin
 NIM : 083134028
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 No Telpon : 085708977130
 Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
 NIP : 19730830 199903 1 002
 Judul Penelitian : Analisis Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah di
 Kota Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
 kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 01 Agustus 2017

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



(Handwritten signature)

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pasar
2. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Bapenda Kab. Jember
 2. Kepala Disperindag Kab. Jember
 di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/3479/314/2017

Tentang

PENELITIAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

: Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember tanggal 01 Agustus 2017 Nomor :B.915/In.20/7.a/PP.00.9/08/2017 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- : Moh. Yasin / 083134028
 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
 Mengadakan Penelitian dengan judul :
 "Analisis Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jember Tahun 2014-2016".
 Badan Pendapatan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
 Agustus s/d September 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara beri bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Keperluan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik

Jika situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 07-08-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER

Sekretaris

 Drs. HERI WIDODO
 Pembina Tk. I
 NIP. 196112211988121001

- an :
 1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Jember;
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kalimantan No. 82 Telepon/Faksimili (0331) 334497

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/456/35.09.331/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAS MA'RUF, AP, M.Si.
 NIP : 19740622 199311 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a
 Jabatan : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa :

Nama : MOH. YASIN
 Nim : 083134028
 Prodi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember

Telah melaksanakan Penelitian Pengambilan Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan judul "Analisis Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jember Tahun 2014-2016" waktu kegiatan bulan Agustus s/d September 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Oktober 2017



KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN JEMBER

ANAS MA'RUF, AP, M.Si.

Pembina

NIP. 19740622 199311 1 001

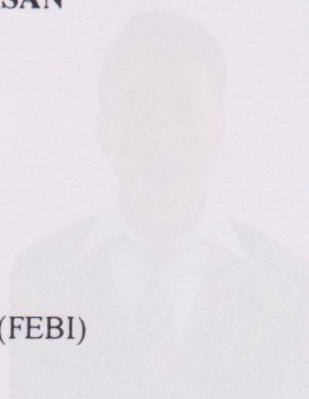
MOH. YASIN
 NIM. 083 134 028

BIODATA PENULIS

PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Moh. Yasin
NIM : 083134028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember



Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :
“Analisis Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pendidikan

- 2001-2016 SDN 5 Ketopong
- 2006-2009 MTs Al-Qodiri 1 Jember
- 2006-2012 Madrasah Dimiah Al-Qodiri 1 Jember
- 2009-2012 Madrasah Aliyah Al-Qodiri 1 Jember
- 2013-2017 Program Studi S1 Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Pengalaman Organisasi

- 1. Pengurus Osis Mts. Al-Qodiri Bidang KeA...
- 2. Ketua Kamar English Camp Pondok P...
- 3. Mastering sistem (MS) English Camp T...
- 4. IKASABA (Ikatan Santri Banyuwangi) T...
- 5. Sepak Bola MA Al-Qodiri
- 6. Futsal MA Al-Qodiri

Pengurus Osis MA Al-Qodiri Bidang Sekretaris 2009/2011

Jember, 05 Oktober 2017
Saya yang menyatakan



MOH. YASIN
NIM. 083 134 028

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Moh. Yasin
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 September 1992
NIM : 083134028
Alamat : Ketapang- Kalipuro-Banyuwangi
Jurusan : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)
No Telp : 085708977130

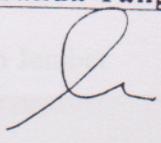
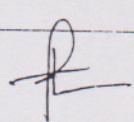
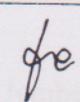
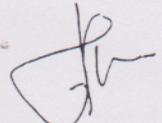
Pendidikan

2001-2016 SDN 5 Ketapang
2006-2009 MTs Al-Qodiri 1 Jember
2006-2012 Madrasah Diniyah Al-Qodiri 1 Jember
2009-2012 Madrasah Aliyah Al-Qodiri 1 Jember
2013-2017 Program Studi S1 Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Osis Mts. Al-Qodiri Bidang keAgamaan Periode 2007/2009
2. Ketua Kamar English Camp Pomdok Pesantren Al-Qodiri 2008-2010
3. Mastering sistem (MS) English Camp "Teaching Skill" 2010/2011
4. IKASABA (Ikatan Santri Banyuwangi) 2007/2017
5. Sepak Bola MA.Al-Qodiri
6. Futsal MA. Al-Qodiri
Pengurus Osis MA.Al-Qodiri Bidang Sekretaris 2009/2011

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	07-Agustus-2017	Meminta surat ijin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	08-Agustus -2017	Mengantarkan surat ijin yang sudah disetujui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
3	09-Agustus-2017	Silaturahmi dan perkenalan sekaligus Observasi dan wawancara dengan tim (DIPERINDAG)	
4	10-Agustus- 2017	Wawancara dengan Bapak Eko Staf Disperindag	
5	11-Agustus-2017	Wawancara dengan Ibu Nengsih Staf Sekretariat Disperindag	
6	12-Agustus-2017	Wawancara dengan Ibu Mala dan Ibu Idah Staf Sistem Umum, Kasubit Pembukuan PAD	



 07 Agustus 2017
 Palangkaraya Personalia

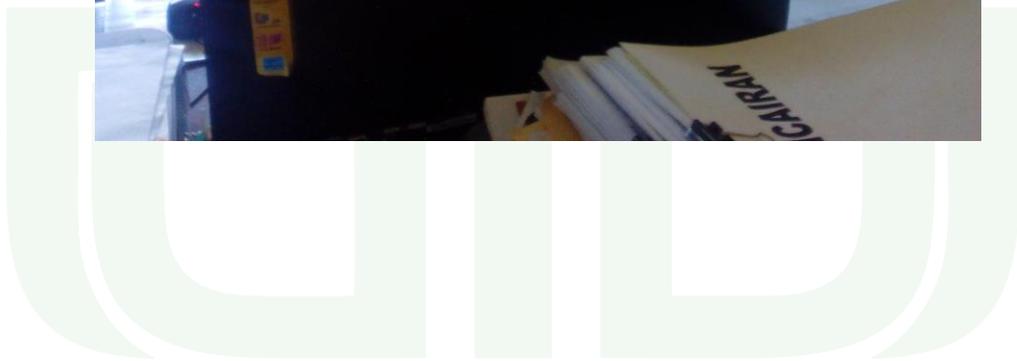
DOKUMENTASI

Wawancara di DISPERINDAG Kabupaten Jember

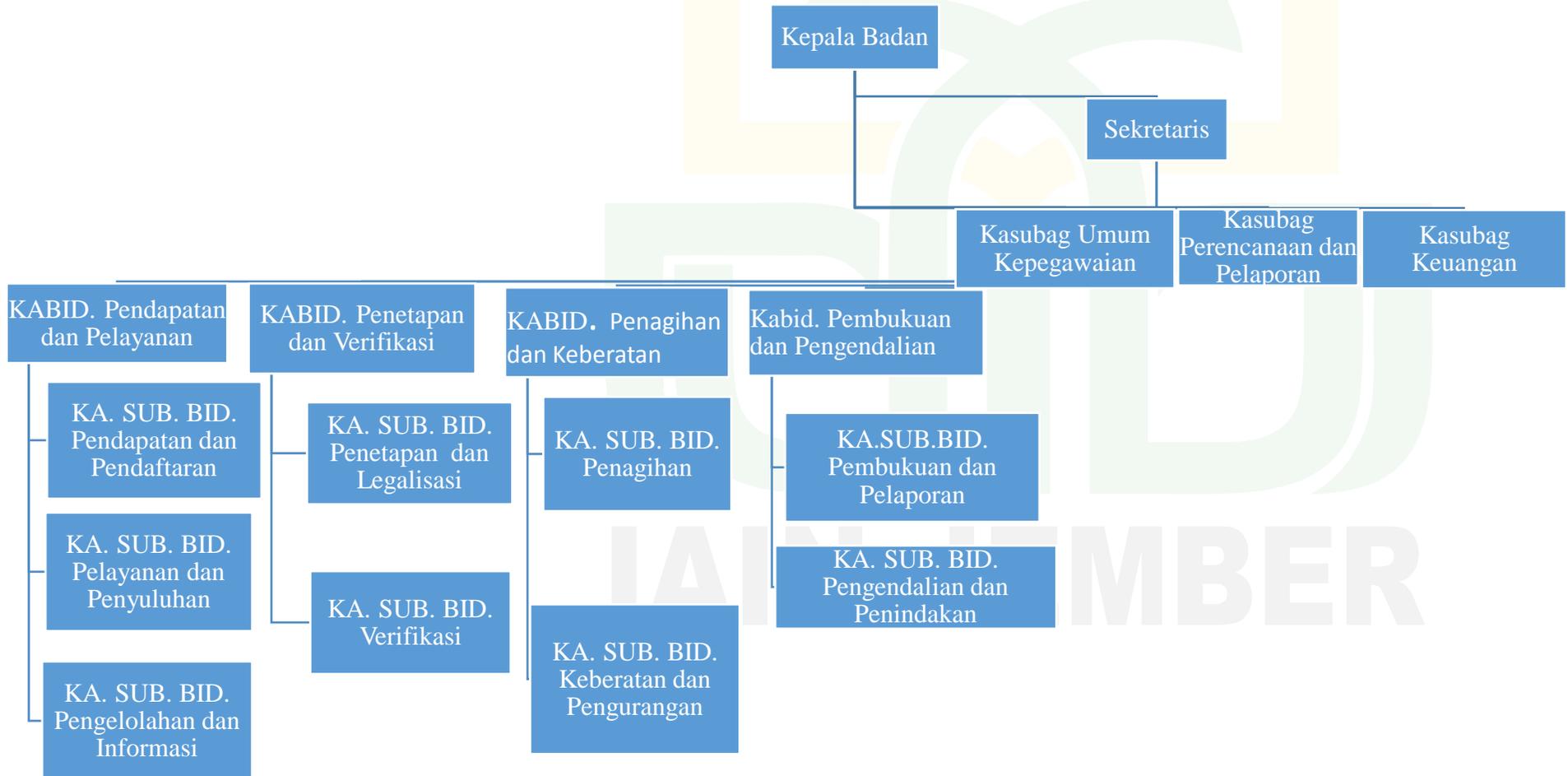


Wawancara di DIPENDA Kabupaten Jember





IAIN JEMBER





IAIN JEMBER

NO	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Hari Buka Pasar	Jumlah Pedagang
1	Tanjung	Jl. Samanhuri No 492 Jember	1971	Setiap Hari	2.665
2	Gebang I	Jl. Melati No 20 Jember	1985	Setiap Hari	219
3	Gebang II	Jl. Melati No 20 Jember	1970	Setiap Hari	225
4	Kreyongan	Jl. Dr. Subandi Jember	1960	Setiap Hari	176
5	Patrang	Jl. Slamet Riyadi Jember	1970	Setiap Hari	57
6	Kepatihan	Jl. Trunojoyo Jember	2002	Setiap Hari	131
7	Sukorejo	Jl. Suparman 232 Jember	1978	Setiap Hari	40
8	Mangli	Jl. Brawijaya 68 Jember	1976	Setiap Hari	175
9	Tegal Besar	Jl. Basuki Rahmat 12 Jember	1998	Setiap Hari	89
10	Bungur	Jl. Bungur Jember	2003	Setiap Hari	32
11	Burung	Jl. Kenanga Jember	1993	Setiap Hari	502
12	Rambipuji	Jl. Wahidin	1978	Setiap Hari	192
13	Jenggawah	Jl. Raya Kawi 31	1970	Setiap Hari	306
14	Petung	Jl. Surabaya	1977	Setiap Hari	18
15	Bangsalsari	Jl. Stasiun No 12 Jember	1950	Setiap Hari	222
16	Tanggul	Jl. Tanggul	1991	Setiap Hari	335
17	Manggisan	Jl. HOS Cokro Minoto	1991	Setiap Hari	178
18	Puger	Jl. Pantai 5 Puger	1960	Setiap Hari	251
19	Umbulsari	Jl. Ahmad Yani No 13 Umbl	1932	Setiap Hari	118
20	Menampu	Jl. Raya Puger	1960	Setiap Hari	50
21	Geladak Merah	Jl. Raya Puger 50 Jember	1980	Setiap Hari	138
22	Balung	Jl. Rambipuji No 17 Balung	1965	Setiap Hari	401
23	Ambulu	Jl. Raya Suyitman Ambulu	1979	Setiap Hari	439

24	Kalisat	Jl. Diponegoro	1994	Setiap Hari	668
25	Sukosari	Jl. Kalisat jember	1950	Setiap Hari	26
26	Sukowono	Jl. Ahmad Yani Sukowano	1965	Setiap Hari	120
27	Mayang	Jl. Rawung No 182 Mayang	1960	Setiap Hari	74
28	Sempolan	Jl. Pb Sudirman 118	2002	Setiap Hari	168
29	Balung Kulon	Jl. Raya Puger No 02	2004	Setiap Hari	177
30	Wirolegi	Mt Haryono	1974	Setiap Hari	155

